

ABSTRAK

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sektor mandiri yang lahir dari masyarakat secara langsung. LSM berkarakter mandiri, dalam perjalanannya diinisiasi berdasarkan kebutuhan masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Sayangnya, di Kabupaten Pandeglang, banyak LSM belum memberikan kontribusi yang optimal, bahkan banyak LSM yang salah jalan. Namun keberadaan LSM Cendekiawan Kampung menarik untuk diteliti. Dalam perjalanannya LSM Cendekiawan Kampung ini telah melakukan kemitraan / kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di masyarakat Pandeglang khususnya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dan bentuk komunikasi politik LSM Cendekiawan Kampung dalam mendorong kebijakan pemerintah Kabupaten Pandeglang di bidang pembangunan SDM melalui program beasiswa kuliah; serta hambatan komunikasinya dalam mendorong kebijakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Sedangkan metode penelitiannya adalah studi kasus, dengan menggunakan paradigma konstruksivisme. Adapun teknik dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu melalui wawancara atau interview mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Peran LSM Cendekiawan Kampung dalam mendorong kebijakan pemerintah Kabupaten Pandeglang di bidang pembangunan SDM melalui program beasiswa kuliah membawa hasil yang positif. Hal ini telah direalisasikan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara LSM Cendekiawan Kampung dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk melakukan kolaborasi dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Pandeglang. 2. Bentuk komunikasi politik yang digunakan oleh LSM Cendekiawan Kampung dalam mendorong kebijakan pemerintah kabupaten Pandeglang yaitu loby dan negosiasi. 3. Dalam melakukan proses komunikasi politik, LSM Cendekiawan Kampung menghadapi beberapa hambatan yang bersifat teknis tentang ketersediaan waktu yang terbatas dan adanya perbedaan status sosial antara LSM Cendekiawan Kampung dengan pemerintah kabupaten Pandeglang. Pelibatan anggota DPRD Pandeglang untuk turut membantu memfasilitasi terjadinya pertemuan antara LSM Cendekiawan Kampung dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang menjadi keharusan sehingga pertemuan diantara dua pihak dapat terselenggara

Kata Kunci : LSM, Komunikasi Politik, Kebijakan Pemerintah.

ABSTRACT

Non-Governmental Organizations (NGOs) are independent sectors born directly from the community. The independent character NGO, in its journey is initiated based on the needs of the community, implemented by the community and beneficial to the community. Unfortunately, in Pandeglang Regency, many NGOs have not made an optimal contribution, even many NGOs have gone the wrong way. However, the existence of the Cendekiawan Kampung NGO is interesting to study. In its journey, this Cendekiawan Kampung NGO has partnered / collaborated with the Pandeglang Regency government in order to improve human resources in the Pandeglang community in particular.

The purpose of this study is to determine the role and forms of political communication of the Cendekiawan Kampung NGO in encouraging the Pandeglang Regency government's policy in the field of human resource development through the college scholarship program, as well as the communication barriers in pushing the policy. This research is a descriptive qualitative research. While the research method is a case study, using the constructivism paradigm. The techniques for collecting data in this study are through interviews or in-depth interviews, observation and document review. The results of this study show: 1. The role of the Cendekiawan Kampung NGO in encouraging the Pandeglang Regency government's policy in the field of human resource development through the college scholarship program has brought positive results. this has been realized through the signing of a cooperation agreement between the Cendekiawan Kampung NGO and the Pandeglang Regency government to collaborate in developing human resources in Pandeglang Regency. 2. The form of political communication used by Cendekiawan Kampung NGO in encouraging the Pandeglang district government's policy is lobbying and negotiation. 3. In carrying out the political communication process, Cendekiawan Kampung NGO faced several technical obstacles regarding the limited time availability and the difference between Cendekiawan Kampung NGO with the Pandeglang district government in social status. The involvement of the Pandeglang legislative to help facilitate a meeting between Cendekiawan Kampung NGO and the Pandeglang regency government is inevitability. So, the meeting between the two parties can be held

Keywords: NGO, Political Communication, Government Policy.